

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt

Evolusi Insurgensi di Era Modern

Sekar Hapsari*

Insurgensi merupakan kata yang memberikan arti tentang gerakan yang dilakukan guna menggulingkan rezim yang sedang berkuasa, atau rezim yang telah terbentuk termasuk para pejabat yang telah terpilih secara sah dan kuat secara hukum. Departemen pertahanan AS memberikan pengertian, insurgensi sebagai gerakan terorganisir yang memiliki tujuan menggulingkan pemerintah melalui subversi dan konflik bersenjata. Ia juga dapat diartikan sebagai perjuangan berlarut larut yang dilakukan secara metodelis, langkah demi langkah dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang mengarah pada penggulingan tatanan yang ada menjadi tidak ada, yang dapat menjadi prediksi dari lahirnya revolusi.

Pendekatan yang dilakukan oleh para insurjen untuk mencapai tujuannya, telah ber "evolusi" dari waktu ke waktu. Pola pendekatan gerakan insurgensi sekarang ini sudah semakin modern, lebih rumit dan *complicated*. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perkembangan insurgensi bersenjata di Indonesia mulai dari insurgensi PKI Madiun hingga kasus-kasus peledakan Bom oleh jaringan Jemaah Islamiah. Pola pendekatan yang semula berfokus militer (PKI Madiun, Andi Aziz, RMS), berkembang menjadi pola pendekatan berfokus identitas kelompok (DI/TII), kemudian



berkembang lagi dengan pola pendekatan konspiratif (G 30S/PKI). Setelah era-Soeharto pola pendekatan berkembang menjadi pola perang berlarut (GAM, OPM, Fretilin), kemudian meningkat dengan dikombinasikannya pendekatan menggunakan medan pemukiman (GAM, Jemaah Islamiah) dan meninggalkan cara-cara lama dengan menggunakan medan terpencil.

Pendekatan yang digunakan TNI dalam memberantas insurgensi selama beberapa dekade ini cenderung stagnan dan tidak berubah. Sejarah keberhasilan TNI dalam menggelar Operasi

Teritorial, ketika memberantas PRRI/Permesta di Sumatera (1962) dan DI/TII Daud Beureuh di Aceh (1962) menjadi parameter keberhasilan penggunaan metode *soft approach* dalam penyelesaian konflik bersenjata di Indonesia kala itu. Namun setelahnya, penggunaan pendekatan yang sama dalam menghadapi insurgensi, tidak mampu merebut hati rakyat (kasus Timtim, GAM, OPM) dan menyelesaikan konflik sampai ke akar permasalahannya. Bahkan dalam kasus Timtim, kegagalan merebut hati rakyat diakhiri dengan lepasnya Timtim dari pangkuan Ibu Pertiwi, akibat kekalahan kelompok

pro-integrasi dalam jajak pendapat di tahun 1999.

Pada dasarnya, Insurjensi dapat dimanfaatkan dalam sebuah sistem operasi yang mengolah input untuk mendapatkan output. Input dari dalam (*endogeny*) seperti rekrutmen, suplai logistik, tempat tinggal, informasi dan lain sebagainya yang diperoleh dalam jumlah yang bervariasi kemudian diolah untuk menjadi output tertentu atau kegiatan. Untuk mendapatkan input dari daerah setempat, diandalkan aneka teknik persuasif maupun koersif. Kadangkalanya tindakan koersif yang keras dikombinasikan dengan tindakan persuasif yang efektif dan meyakinkan untuk mendapat dampak yang diinginkan.

Memang, peningkatan aktivitas insurjensi bergantung pada struktur politik negara guna mengontrol kebebasan ekonomi, politik, dan sosial masyarakat. Karenanya kegiatan insurjensi dipandang sebagai bentuk "gerakan atau upaya politik dengan tujuan tertentu" (terrorism research, 2009). Tujuan politik insurjensi tumbuh subur dalam situasi di mana "perpecahan sosial yang kumulatif dan digabungkan dengan kesenjangan ekonomi dan politik" (O'Neill, 2005: 4). Identifikasi banding eksoteris, lebih khusus merendahkan politik dan ekonomi sangat penting dalam memahami kerusuhan sosial yang mengarah ke tindakan insurjensi. Meningkatnya pengangguran, ketimpangan distribusi kekayaan, kontrol elitis dari struktur politik, dan kepemimpinan yang korup adalah penyebab ketidakpuasan populer, sehingga membuka pintu untuk bertindak insurjensi dan perang gerilya.

Dalam memeriksa efek banding eksoteris pada kedua "inteligensia dan massa," yang mengarah ke "pengangguran terselubung atau dapat menyebabkan tidak hanya untuk pasokan yang tidak memadai dari kebutuhan material, tetapi juga ketidakpuasan psikologis" (O'Neill, 2005: 101). "Massa," Gabriel Almond (1966) berpendapat, "hanya mampu mendaftarkan keluhan mereka; mereka tidak dapat memahami bentuk dan bentuk proses sejarah di mana mereka keluhkan hanyalah insiden." Hal ini pada gilirannya memungkinkan untuk melakukan manipulasi dan eksploitasi yang luas untuk menghasut dukungan rakyat dengan berbagai gerakan, seperti

gerakan komunisme sebelumnya atau indoktrinasi Marxis-Leninis di berbagai daerah terhadap penyakit dari masyarakat kapitalistik/Barat Amerika, setting panggung untuk aksi gerilyawan memungkinkan terjadi terhadap politik kepemimpinan negara.

Insurjensi modern telah berevolusi dari kegagalan politik awal kepada kemampuan mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan telah minimal. Keberadaan berkurang dari abad pertengahan, dibandingkan dengan populasi modern yang muncul dari tidak hanya ketidakmampuan mayoritas yang terkena dampak untuk mendapatkan persenjataan, tetapi dari kemampuan mereka untuk mempengaruhi kondisi ekonomi dan politik di mana mereka bekerja. Jika mereka kelaparan, atau memberontak dan dibantai,



tidak ada yang peduli, tidak ada ekonomi atau politik kelas yang kuat, kepada siapa itu akan dapat membuat perubahan sedikit pun" (Taber, 2002: 14). Pada akhirnya, untuk memberontak adalah tindakan langsung terhadap diri mereka sendiri, dengan hilangnya nyawa makhluk ada konsekuensinya untuk elitisme politik, atau sentralitas ekonomi.

Pustaka Acuan:

- *Penulis adalah mahasiswa Ph.D KFU Rusia, sekaligus pengamat Hukum Pertahanan dan Kedaulatan Perbatasan Negara.
- Thomas Erik miller, 2002. Thesis: The efficacy of Urban insurgency in The Modern Era, Naval Postgraduate School, Monterey.
- O'Neill, B.E. 2005. Insurgency and Terrorism: From Revolution to Apacalypse. Washington DC. Potomac Books
- Taber, R. 2002. War of the Flea: The classic Study of Guerilla warfare. Washington DC. Potomac Books.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Indah Furba, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamilah.